

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pedoman SAKIP dan komitmen pemerintah daerah terhadap efektivitas penerapan SAKIP dimediasi budaya kerja di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pedoman SAKIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan dengan adanya pemahaman terhadap pedoman SAKIP dan pedoman yang jelas dapat meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP di Kabupaten Sidoarjo.
2. Komitmen pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah yang tinggi dapat mendorong pelaksanaan SAKIP dengan efektif.
3. Pedoman SAKIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya kerja di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pedoman yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif, kondusif, dan produktif.
4. Komitmen pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya kerja di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pemerintah daerah yang berkomitmen tinggi dapat menciptakan budaya kerja yang positif.

5. Budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya budaya kerja yang positif dapat meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP di Kabupaten Sidoarjo.
6. Budaya kerja mampu memediasi pedoman SAKIP terhadap efektivitas penerapan SAKIP di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menyatakan bahwa budaya kerja mampu memediasi hubungan pedoman SAKIP dan efektivitas implementasi SAKIP di Kabupaten Sidoarjo.
7. Budaya kerja mampu memediasi komitmen pemerintah daerah terhadap efektivitas penerapan dalam SAKIP di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja mampu memediasi hubungan komitmen pemerintah daerah dan efektivitas implementasi SAKIP di Kabupaten Sidoarjo.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar tidak hanya menggunakan metode survey yaitu penyebaran kuesioner sebagai pengumpulan data. Metode lain seperti wawancara mendalam atau analisis data sekunder dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam.

2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memberikan tambahan jumlah objek penelitian dengan memperbanyak lingkup area studi, misalnya dengan memasukkan lingkup kecamatan atau bahkan wilayah lain di luar Kabupaten Sidoarjo.
3. Pemerintah daerah harus terus mengembangkan dan menyempurnakan pedoman SAKIP. Pedoman yang jelas dan mudah dipahami akan membantu pegawai dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan komitmen terhadap implementasi SAKIP melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung. Hal ini termasuk pelatihan kepemimpinan, pemberian insentif kinerja, dan evaluasi rutin terhadap implementasi SAKIP.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk memahami hasil dan interpretasinya secara mendalam. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan hanya mencakup lingkup dinas di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini mungkin membatasi generalisasi temuan penelitian ke daerah atau instansi lain yang memiliki karakteristik dan konteks berbeda.
2. Beberapa dinas di Kabupaten Sidoarjo sulit dihubungi dan durasi pengisian kuesioner yang cukup lama, sehingga peneliti harus menunggu dalam waktu yang tidak menentu.

5.4. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik di bidang implementasi SAKIP. Implikasi-implikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini mendukung teori *agency*, teori *stewardship*, dan teori kontinjensi yang menunjukkan bahwa komitmen dari pemerintah daerah dan budaya kerja yang positif memainkan peran penting dalam efektivitas implementasi kebijakan dan pedoman di sektor publik. Temuan ini menambah literatur tentang pentingnya peran budaya kerja dalam memediasi hubungan antara pedoman/kebijakan dan hasil kinerja organisasi. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menyoroti pentingnya pedoman SAKIP dan komitmen pemerintah daerah sebagai faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas implementasinya

2. Implikasi Praktis

Pemerintah daerah dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk memperkuat dan menyempurnakan pedoman SAKIP. Pedoman yang lebih jelas dan terstruktur akan membantu pegawai dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban

instansi pemerintah. Selanjutnya, temuan bahwa komitmen pemerintah daerah memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi SAKIP menunjukkan perlunya pemerintah daerah meningkatkan komitmen mereka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa budaya kerja mempunyai peran mediasi yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu fokus pada pengembangan budaya kerja yang mendukung, termasuk peningkatan komunikasi internal, kolaborasi tim, dan penghargaan terhadap inovasi serta kinerja pegawai. Budaya kerja yang positif akan memperkuat efektivitas implementasi SAKIP.